

**ANALISIS DAMPAK AKTIVITAS PROYEK TAMBANG TIMAH
Di PERAIRAN LAUT PULAU BANGKA TERHADAP HAK ATAS PEKERJAAN
NELAYAN TRADITIONAL : Perspektif *Inclusive Citizenship***

Krisna Adrian, Winarno, Rima Vien Permata Hartanto

Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹ krisnaadrian98@student.uns.ac.id, ² winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id,

³ rimavien@staff.uns.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Diterima:</p> <p>Disetujui:</p> <p>Kata kunci: Proyek tambang timah</p> <p>Nelayan tradisional</p> <p>Hak atas pekerjaan</p>	<p>Diskursus mengenai persoalan aktivitas proyek tambang timah di Laut Pulau Bangka sangat penting untuk dikaji karena telah berdampak pada kehidupan nelayan tradisional. Tulisan ini menganalisa dampak-dampak yang ditimbulkan dari aktivitas proyek tambang timah di laut terhadap hak atas pekerjaan nelayan tradisional di Kelurahan Matras, Kabupaten Bangka ditinjau dari perspektif <i>inclusive citizenship</i>. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan cara <i>purposive sampling</i> dan <i>snow ball</i>. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Uji validitas terhadap data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas proyek tambang timah di Laut Pulau Bangka telah berdampak negatif terhadap hak atas pekerjaan nelayan tradisional. Dampak-dampak negatif tersebut yaitu: 1) kerusakan ekosistem laut, 2) terganggunya jalur mobilitas nelayan tradisional, 3) menjauhnya wilayah tangkap, 4) bertambahnya waktu dan kebutuhan modal melaut, 5) spesifikasi kapal menjadi tidak kompatibel untuk berlayar lebih jauh. 6) nelayan terpaksa terjebak dalam kondisi terikat pada hutang dengan tengkulak, 7) meningkatnya risiko keselamatan saat melaut. Aktivitas proyek tambang timah di laut menyebabkan kehidupan sosial masyarakat sekitar menjadi terpolarisasi. Hal ini menjelaskan bahwa hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional di Kawasan Matras sangat terancam akibat aktivitas proyek tambang timah di laut. Berdasarkan perspektif <i>inclusive citizenship</i>, dampak aktivitas proyek tambang timah di laut terhadap hak atas pekerjaan nelayan tradisional menunjukkan bahwa praktik kewarganegaraan di Indonesia belum sepenuhnya inklusif.</p>
<p>Received:</p> <p>Accepted:</p> <p>Keywords: tin mining project, traditional fishermen, right to work</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>The discourse on the issue of tin mining project activities in the Bangka Island Sea is very important to study because it has an impact on the lives of traditional fishermen. This paper analyzes the impacts of tin mining project activities in the sea on the right to work for traditional fishermen in Matras Village, Bangka Regency in terms of inclusive citizenship perspective. This research method is qualitative with descriptive analysis approach. Sampling using purposive sampling and snow ball. The research data were collected through interviews, observations, and literature studies. The validity test of the data was carried out by means of triangulation of sources and methods which were then analyzed using an interactive model. This study shows that tin mining project activities in the Bangka Island Sea have had a negative impact on the rights to work of traditional fishermen. These negative impacts are: 1) damage to marine ecosystems, 2) disruption of the mobility path of traditional fishermen, 3) distance from fishing areas, 4) increase in time and capital requirements to go to sea, 5) ship specifications become incompatible to sail further. 6) fishermen are forced to be trapped in a condition of being tied to debt by middlemen, 7) increasing safety risks when going to sea. The activity of tin mining projects in the sea causes the social life of the surrounding community to become polarized. This explains that the right to work for traditional fishermen in the Matras Area is highly threatened due to tin mining project activities at sea. Based on the perspective of inclusive citizenship, the impact of tin mining project activities at sea on the rights to traditional fishermen's work shows that citizenship practices in Indonesia are not yet fully inclusive.</i></p>

Copyright © 202x (Krisna, Winarno, Rima). All Right Reserved

Tambang timah dan Pulau Bangka, telah menjadi dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Eksistensi aktivitas tambang timah di Pulau Bangka telah berlangsung sejak masa kolonialisme. Ibrahim (2015: 78) menyatakan bahwa pada masa kolonial Belanda, terdapat tiga perusahaan pertambangan timah yaitu *Bangka Tin Winning Bedrijf (BTW)*, *Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton (GMB)*, dan Singkep Tin Exploitatie *Maatschappij (SITEM)*. Namun, mulai tahun 1953 sampai dengan 1958, ketiga perusahaan tersebut dinasionalisasikan menjadi perusahaan negara yaitu PN Tambang Timah Bangka, PN Tambang Timah Belitung, dan PN Tambang Timah Singkep. Pada tahun 1968, ketiga perusahaan negara tersebut melebur menjadi satu perusahaan yaitu PT Tambang Timah. Perusahaan ini adalah cikal bakal PT Timah (Persero) saat ini.

Aktivitas penambangan timah terbagi menjadi dua jenis yaitu terkonsentrasi di darat dan laut. Penambangan di darat dilakukan dengan cara menggali tanah hingga kedalaman tertentu, kemudian pasir dan biji timah dialirkan ke tempat yang disebut sakan untuk dipilah antara biji timah dengan pasir. Sedangkan jenis kegiatan tambang timah di laut dilakukan dengan memanfaatkan kapal keruk, kapal isap, atau ponton apung yang menyedot pasir dari dasar laut ke tempat pemilahan material. Seluruh kegiatan pemilahan antara pasir dan biji timah, juga dilakukan di laut. Pada awalnya, konsentrasi kegiatan tambang timah hanya di daratan. Namun, karena aktivitas penambangan telah berlangsung lama, cadangan timah di daratan menipis. Akibatnya, aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas penambangan timah mulai memindahkan konsentrasinya ke laut.

Pada dasarnya, aktivitas penambangan timah di darat maupun laut tidak hanya memberikan keuntungan secara materil, melainkan juga mempunyai dampak serius terhadap kelangsungan hidup manusia. Kegiatan tambang telah menciptakan masalah lingkungan dan respon masyarakat terhadap krisis ekologi yang disebabkan (Hyndman & Kirsch dalam Erman, 2010: 72). Khusus proyek tambang timah yang terkonsentrasi di laut, telah menyebabkan perubahan bentang alam kawasan pesisir, menurunnya kesuburan perairan, keruhnya air laut, merusakkan ekosistem dan musnahnya biota laut, serta pencemaran logam berat (Prianto dan Husnah, 2009: 194-195).

Dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang timah terhadap ekosistem laut tersebut, berimbas langsung pada nelayan tradisional. Adi

(2012: 14) menyatakan bahwa implikasi langsung akibat kerusakan ekosistem laut oleh aktivitas penambangan timah bagi nelayan tradisional di antaranya adalah jarak melaut yang semakin jauh, berkurangnya jumlah produksi, kerusakan alat tangkap nelayan, dan biaya melaut menjadi lebih tinggi. Berbagai dampak yang dirasakan nelayan tradisional akibat proyek tambang timah di Laut Pulau Bangka tersebut sangat mengancam eksistensi pekerjaan mereka.

Salah satu masyarakat yang terkena dampak aktivitas tambang timah di laut menyatakan bahwa “ribuan keluarga di Matras, Bedukang, Tuing hingga Pesaren kehilangan pencarian akibat aktivitas kapal-kapal isap produksi di laut bukan hanya untuk saat ini, melainkan juga beberapa generasi ke depan karena laut kami akan rusak” (<https://sumsel.suara.com/read/2021/07/14/115809/gubernur-bangka-belitung-tak-hadir-nelayan-tinggalkan-kapal-isap-timah?page=all>, diakses pada 17 Juli 2021 pukul 22.42 WIB). Senada dengan pernyataan di atas, salah satu nelayan tradisional di Kawasan Matras menyatakan bahwa, “semenjak adanya aktivitas tersebut, hasil tangkapan nelayan menjadi berkurang bahkan sampai hilang total” (<https://bangka.tribunnews.com/2021/04/05/nelayan-ini-ungkap-terpaksa-melaut-sejauh-21-mil-setelah-aktivitas-tambang-ganggu-area-tangkapan>, diakses pada 18 Juli 2021, pukul 09.33 WIB). Pernyataan di atas menunjukkan bahwa aktivitas proyek tambang timah di Perairan Laut Pulau Bangka telah mengancam kegiatan tangkap nelayan tradisional.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, terjadi penurunan signifikan jumlah produksi perikanan tangkap dari tahun 2019 sampai 2020. Pada tahun 2019, jumlah produksi perikanan tangkap khusus di Kecamatan Sungailiat mencapai 19.157,88 ton, sedangkan tahun 2020 hanya mencapai 15.045,90 ton. Penurunan jumlah produksi perikanan tangkap ini tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aktivitas proyek tambang timah di laut. Apabila kondisi ini terus terjadi, maka nasib para nelayan tradisional akan semakin terancam. Bahkan, Yuniarto (2009: 103) menyatakan bahwa maraknya kegiatan penambangan timah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat menyebabkan ketidakpastian masa depan kehidupan masyarakat.

Terancamnya posisi nelayan tradisional dalam kegiatan tangkap di laut adalah bentuk diskriminasi terhadap hak atas pekerjaan bagi

mereka. Terlebih, nelayan tradisional adalah kelompok yang memiliki keterbatasan dalam segala hal dan tergolong dalam lapisan sosial paling miskin ketimbang kelompok masyarakat lain di sektor pertanian (Mubyarto dalam Listyawati, 2016: 62). Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan terhadap hak nelayan tradisional atas pekerjaan.

Perlindungan terhadap hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional sejatinya telah termaktub dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, dalam kehidupan bernegara, tidak diperkenankan ada kelompok yang tereksklusifkan haknya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya justru seringkali terjadi benturan kepentingan sektoral yang menyebabkan hak-hak kelompok yang lemah posisinya dalam struktur sosial seperti nelayan tradisional terancam. Heater (1999) menyatakan bahwa, *“the existence of citizens’ rights in the form of their enshrinement in a constitutional document is a most imperfect index of the existence of rights in practice”*. Problematika mengenai pemenuhan hak warga negara tersebut kemudian dijabarkan oleh Heater (1999) ke dalam empat kategori yaitu *rights effectively denied*, *rights not defined but mainly available*, *rights defined in distorted form* dan *rights defined but difficulties in practice*.

Padahal, hak atas pekerjaan merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan seseorang. Melalui pekerjaan, setiap orang dapat menjaga dirinya dari perangkap kemiskinan struktural. Drzewicki dalam El Muhtaj (2008: 180) bahkan menyatakan bahwa pekerjaan bukan hanya inti dari hak sosial ekonomi, tetapi juga hak asasi manusia yang fundamental. Artinya, pekerjaan adalah unsur terpenting yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan bukan hanya sekadar pelaksanaan kewajiban negara terhadap warganya, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, ide dasar konsep kewarganegaraan menekankan pada persamaan kolektif bagi seluruh warga negara tanpa ada yang tereksklusifkan. Pandangan ini mengharuskan penerapan konsep kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara harus inklusif. Kewarganegaraan inklusif adalah konsep yang menekankan pada prinsip dan nilai keadilan sosial bagi seluruh anggota kelompok masyarakat tanpa memandang identitas. Lister (2007: 50-51) menjabarkan bahwa konsep kewarganegaraan inklusif harus memenuhi empat nilai utama yaitu *justice*, *recognition*, *self-determination*, dan *solidarity*.

Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis bagaimana posisi hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional yang terdampak aktivitas proyek tambang timah di Laut Pulau Bangka dari perspektif *inclusive citizenship*.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snow ball*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Uji validitas terhadap data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Selain itu, data dalam penelitian ini dianalisis dengan model interaktif yang terbagi dalam empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian/Kajian

Dampak Proyek Tambang Timah di Laut terhadap Hak Atas Pekerjaan Nelayan Tradisional di Kawasan Matras

Aktivitas proyek tambang timah di Laut Pulau Bangka, telah berdampak pada hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional di Kawasan Matras terutama pada akses terhadap pekerjaan dan keamanan dalam bekerja. Unsur hak atas pekerjaan yang tidak terdampak hanya kebebasan dari kerja paksa. Dampak pada akses terhadap pekerjaan dapat dilihat dari kondisi laut sekitar wilayah aktivitas tambang yang rusak, meningkatnya kebutuhan modal bahan bakar dan ransum untuk melaut, serta menjauhnya wilayah tangkap yang menyebabkan risiko keselamatan nelayan tradisional semakin besar akibat keterbatasan peralatan tangkap mereka. Dampak pada akses terhadap pekerjaan terutama menjauhnya wilayah tangkap nelayan tradisional, membuat risiko atas keselamatan jiwa meningkat. Peningkatan risiko terhadap keselamatan jiwa nelayan tradisional menunjukkan bahwa unsur hak atas pekerjaan yaitu keamanan dalam bekerja terdampak aktivitas tambang timah di Laut Pulau Bangka.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terdapat dampak langsung pada akses terhadap pekerjaan dan keamanan dalam bekerja bagi nelayan tradisional di Laut Matras akibat proyek tambang timah di laut. Adanya dampak terhadap unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan nelayan tradisional di Kawasan Laut Matras menjadi terancam akibat

keberadaan kapal-kapal isap produksi timah. Craven (1995: 205) menguraikan bahwa terdapat tiga fitur utama dalam hak atas pekerjaan yaitu akses terhadap pekerjaan, kebebasan dari kerja paksa, dan keamanan dalam pekerjaan. Artinya, apabila terdapat ancaman terhadap unsur-unsur tersebut, maka hak atas pekerjaan seseorang tidak terpenuhi.

Pada dasarnya, hak atas pekerjaan adalah hak fundamental seseorang sebagai klaim moral yang tidak dapat dialihkan dan melekat pada semua manusia (Levin, 1998: 3). Konsekuensinya, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan seseorang menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh negara. Hal ini tidak terlepas dari implikasi dari konstruksi konsep warga negara yang memberikan seseorang tersebut identitas kewarganegaraan, hak istimewa, dan kewajiban terhadap organisasi negara itu sendiri.

Selain itu, diskursus mengenai hak atas pekerjaan warga negara adalah bentuk pembahasan penting mengenai kelangsungan hidup seseorang. Pekerjaan merupakan sarana utama yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Kondisi kesejahteraan seseorang akan sangat bergantung pada kondisi pekerjaan yang dimilikinya. Namun, pada praktiknya seringkali persoalan vital ini saling berbenturan akibat gesekan kepentingan sektoral sebagaimana yang terjadi antara nelayan tradisional di Laut Matras dengan proyek tambang di laut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ancaman terhadap fitur-fitur hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional di Kawasan Laut Matras. Dampak yang paling terasa dari aktivitas proyek penambangan timah oleh kapal-kapal isap produksi yaitu pada akses terhadap pekerjaan nelayan tradisional. Padahal, Fukuda-Parr (2009: 202) menyatakan bahwa fitur penting dari hak atas pekerjaan terletak pada akses terhadap pekerjaan dan kondisi pekerjaan yang produktif. Artinya, dengan adanya dampak pada akses terhadap pekerjaan nelayan tradisional, sama halnya dengan mengganggu produktivitas mereka.

Poin pertama yang dapat dilihat dari dampak aktivitas proyek tambang timah di laut oleh kapal-kapal isap produksi pada akses nelayan tradisional terhadap pekerjaan adalah bagaimana kondisi lahan tangkap mereka. Kondisi lahan tangkap menjadi salah satu poin penting karena konsentrasi aktivitas nelayan tradisional berada di laut. Oleh karena itu, lahan tangkap menjadi

salah satu yang mempengaruhi produktivitas pekerjaan nelayan tradisional.

Keberadaan kapal-kapal isap produksi tambang timah yang beroperasi di Kawasan Laut Matras, telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut. Narasumber-narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa proyek tambang timah di laut telah merusak Laut Matras. Kerusakan yang terjadi di Laut Matras di antaranya yaitu kerusakan ekosistem terumbu karang, pendangkalan laut, dan keruhnya air laut. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Prianto dan Husnah (2009: 194-195) yang menyatakan bahwa aktivitas tambang timah di laut telah menyebabkan perubahan bentang alam kawasan pesisir, menurunnya kesuburan perairan, keruhnya air laut, kerusakan ekosistem dan musnahnya biota laut, serta pencemaran logam berat. Namun, dampak kerusakan terparah yang disebabkan oleh aktivitas penambangan timah di laut tersebut berada di sekitar wilayah operasional kapal-kapal isap produksi. Artinya, kerusakan terhadap lahan tangkap nelayan tradisional memang terjadi. Akan tetapi, jika merujuk pada Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP3K, kerusakan ekosistem laut berada pada wilayah yang menjadi zona pertambangan. Pasal 15 Perda RZWP3K telah mengatur bahwa Laut Pulau Bangka secara berurutan terbagi menjadi enam zona pengelolaan yaitu pariwisata, pelabuhan, pertambangan, perikanan budi daya, perikanan tangkap, dan industri. Menurut ketentuan dalam Perda RZWP3K tersebut, kerusakan laut akibat aktivitas tambang timah oleh kapal-kapal isap berada pada zona yang berbeda dengan wilayah tangkap nelayan.

Kerusakan laut akibat eksistensi kapal-kapal isap produksi tersebut kemudian juga menjadi persoalan bagi akses terhadap pekerjaan nelayan ketika kondisi ini mengganggu jalur melaut nelayan tradisional dan membuat jarak yang harus ditempuh semakin jauh. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan banyaknya kapal-kapal isap di Laut Matras ditambah dengan sisa hasil produksi timah yang menyebabkan pendangkalan laut hingga membentuk beting-beting, akses lalu lintas nelayan dari darat ke laut maupun sebaliknya menjadi berubah dan terganggu. Para nelayan tradisional di Laut Matras terpaksa menghindari kawasan aktivitas penambangan timah tersebut, sehingga jarak yang harus ditempuh menjadi lebih jauh dan berbahaya bagi kapal-kapal mereka. Akibat keberadaan kapal-kapal isap

produksi tambang timah di laut, para nelayan harus menempuh jarak sekitar 15 mil bahkan lebih untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak. Padahal, sebelum adanya aktivitas penambangan timah di laut, para nelayan tradisional dapat memperoleh hasil tangkapan yang banyak tanpa menempuh jarak hingga 15 mil. Selain itu, keberadaan kapal-kapal isap dan beting-beting hasil produksi tambang timah membahayakan kapal-kapal nelayan tradisional apabila tertabrak. Terganggunya mobilitas nelayan dan menjauhnya jarak melaut menjadi ancaman terhadap hak atas pekerjaan mereka. Hal ini dikarenakan sebelum adanya aktivitas penambangan di laut oleh kapal-kapal isap produksi, rute dan jalur para nelayan tradisional di Laut Matras relatif aman serta bebas gangguan. Oleh karena itu, eksistensi kapal-kapal isap tersebut selain merusak ekosistem laut juga mengganggu aksesibilitas nelayan tradisional untuk melaut.

Berubahnya jarak tempuh dan waktu nelayan tradisional di Laut Matras untuk melaut akibat keberadaan kapal-kapal isap produksi serta limbah sisa penambangan timah, membuat kebutuhan modal bahan bakar dan ransum menjadi meningkat. Padahal, bahan bakar dan ransum merupakan unsur penting lainnya dalam akses nelayan terhadap pekerjaan. Hal ini disebabkan karena bahan bakar dan ransum merupakan kebutuhan utama nelayan tradisional untuk melaut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan modal bahan bakar dan ransum nelayan tradisional di Laut Matras meningkat hampir 100 persen. Jika semula untuk sekali melaut cukup dengan kisaran 100.000 hingga 150.000, maka saat ini meningkat pada kisaran 200.000 hingga 250.000. Artinya, keberadaan kapal-kapal isap produksi tambang timah di Laut Matras berdampak secara langsung pada kebutuhan modal bahan bakar dan ransum nelayan tradisional. Padahal, nelayan tradisional adalah kelompok nelayan dengan karakteristik kepemilikan modal terbatas (Kusnadi, 2008).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan terhadap modal bahan bakar dan ransum untuk nelayan tradisional melaut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendapatan bersih mereka turun. Bahkan terkadang, pada musim-musim tertentu pendapatan yang diperoleh para nelayan tradisional di Laut Matras hanya dapat mengembalikan modal saja. Padahal, jumlah pendapatan adalah salah satu kunci peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional. Menurunnya pendapatan yang

diperoleh nelayan tradisional dapat membawa mereka terjebak pada lingkaran kemiskinan. Imron (2003: 70) menjabarkan bahwa, “skema kemiskinan nelayan bermula pada pendapatan yang rendah, sehingga menyebabkan nelayan tradisional tidak dapat meningkatkan teknologi tangkap mereka. Keterbatasan pada teknologi tangkap tersebut akhirnya berimbas pada jumlah hasil tangkapan yang diperoleh nelayan tradisional. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh nelayan tradisional tetap rendah”. Hal inilah yang juga dialami nelayan tradisional di Kawasan Laut Matras. Peningkatan modal melaut yang menyebabkan turunnya pendapatan bersih para nelayan tradisional, membuat mereka tidak dapat meningkatkan kapasitas teknologi tangkap. Akibatnya, mereka terus terjebak dalam kondisi serba keterbatasan.

Kusnadi (2008) menyatakan bahwa salah satu ciri khusus nelayan tradisional adalah teknologi tangkap yang digunakan sederhana dengan ukuran perahu relatif kecil, daya jelajah terbatas, kapasitas perahu sedikit, dan perahu menggunakan layar, dayung, atau mesin berPK kecil antara 5-10 PK. Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi peralatan tangkap khususnya perahu yang dimiliki nelayan di Kawasan Laut Matras. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, seluruh kapal nelayan yang terlihat menepi di Pesisir Laut Matras berukuran kecil. Para nelayan menuturkan bahwa rata-rata kapasitas kapal yaitu setengah GT (*gross ton*) dengan ukuran mesin di bawah 15 PK. Artinya, kondisi kapal-kapal tersebut terbatas dalam hal daya jelajah. Namun, keberadaan kapal-kapal isap produksi yang beraktivitas di Laut Matras, membuat para nelayan dengan kondisi kapal terbatas melaut lebih jauh dan lama. Para nelayan menyatakan bahwa risiko yang dihadapi sangat besar terlebih ketika cuaca buruk.

Berbagai dampak pada akses terhadap pekerjaan di atas adalah persoalan yang harus dihadapi nelayan tradisional di Laut Matras. Nelayan-nelayan tradisional di Laut Matras, terpaksa untuk terus melaut walaupun dengan keterbatasan dan dampak dari aktivitas penambangan timah di laut terhadap akses pekerjaan mereka. Keadaan ini digambarkan Garrett Hardin dalam teorinya yaitu *the tragedy of the common* bahwa kegiatan tangkap oleh nelayan akan terus dilakukan bahkan ditingkatkan, walaupun jumlah tangkapan dan pendapatan yang diperoleh semakin berkurang (McGoodwin, 1990). Hal ini tetap dilakukan karena orientasi nelayan tradisional tersebut melaut adalah untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari (Kusnadi, 2008).

Selain akses terhadap pekerjaan, fitur lain dalam hak atas pekerjaan adalah kebebasan dari kerja paksa. Kebebasan dari kerja paksa memberikan penekanan pada pekerjaan yang bebas tanpa ada intervensi dari pihak lain. Setiap orang bebas untuk bekerja sesuai dengan keinginannya dan kemauannya tanpa boleh ada paksaan dari pihak manapun. Pasal 2 Ayat 1 Konvensi ILO Nomor 29 Tahun 1930 menyatakan bahwa kerja paksa adalah semua pekerjaan yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman dalam bentuk apapun (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124556.pdf, diakses pada 29 Juni 2021, pukul 21.46 WIB). Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kerja paksa dapat terjadi pada seseorang yang rentan dalam struktur sosial.

Apabila kemudian ditarik pada kondisi nelayan tradisional, maka mereka dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok yang rentan terhadap praktik kerja paksa tersebut. Hal tersebut disebabkan karena nelayan tradisional dalam struktur sosial di masyarakat adalah kelompok yang paling miskin ketimbang kelompok lainnya di sektor pertanian (Mubyarto dalam Listyawati, 2016: 62). Kusnadi (2004) mengemukakan bahwa salah satu penyebab eksternal kemiskinan nelayan tradisional adalah sistem pemasaran hasil tangkap yang lebih menguntungkan para tengkulak.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nelayan tradisional di Laut Matras tidak terlepas dari praktik perdagangan hasil tangkap mereka dengan tengkulak. Bahkan, para nelayan tradisional seringkali berhutang kepada para tengkulak untuk memenuhi kebutuhan modal melaut mereka yang kurang. Hal ini terjadi karena pendapatan sebagai nelayan tidak menentu. Akibatnya, ketika kebutuhan terhadap modal melaut tidak tercukupi, maka para nelayan tradisional tersebut berhutang pada tengkulak. Terlebih, setelah kapal-kapal isap produksi mulai melakukan aktivitas penambangan timah di laut yang menyebabkan kebutuhan modal nelayan meningkat.

Praktik hutang-piutang antarkeduanya, tidak serta merta membuat nelayan-nelayan tradisional di Laut Matras terikat dan terpaksa bekerja di bawah tekanan tengkulak. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nelayan-nelayan tradisional tetap melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai kehendak dan pilihannya

masing-masing. Tidak didapati kasus nelayan tradisional yang terpaksa bekerja karena ancaman hukuman apapun. Artinya, walaupun kebutuhan modal meningkat akibat aktivitas tambang timah di laut dan membuat para nelayan terpaksa berhutang kepada tengkulak ketika kebutuhan modal untuk melaut tidak tercukupi, praktik kerja paksa pada nelayan tradisional di Laut Matras tidak terjadi. Namun, walaupun tidak didapati praktik kerja paksa terhadap nelayan tradisional di Kawasan Laut Matras, kegiatan hutang-piutang yang dilakukan nelayan tradisional membawa mereka pada kondisi yang terikat. Hutang-hutang yang dimiliki para nelayan tradisional kepada tengkulak, secara substansial membawa mereka pada situasi yang sulit. Tidak dapat dipungkiri bahwa hutang para nelayan tradisional menjadi tambahan beban di tengah berbagai keterbatasan yang mereka hadapi. Imron (2003: 73) mengemukakan bahwa praktek hutang-piutang antara nelayan dengan juragan (tengkulak) menjadi *poverty rackets* (roda penggerak kemiskinan), sehingga membawa mereka pada kondisi kesulitan ekonomi yang lebih dalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma mengenai perekonomian nelayan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh antara penangkapan ikan, pengolahan pasca panen, pemasaran, hingga konsumsi (Hartanto, R.V.P, dkk, 2019: 355).

Selain itu, aktivitas penambangan timah di laut oleh kapal-kapal isap produksi yang berdampak pada akses terhadap pekerjaan nelayan tradisional di Kawasan Matras, juga memiliki efek domino terhadap risiko keselamatan mereka saat melaut. Hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa menjauhnya jarak untuk melaut ditambah dengan kondisi kapal terbatas dari segi kapasitas tampung, mesin, dan daya jelajah membuat risiko terhadap keselamatan para nelayan tradisional sangat besar. Risiko tersebut kemudian semakin besar ketika dihadapkan pada cuaca buruk dan badai saat melaut. Para nelayan tradisional dengan kondisi mesin kapal yang kecil terpaksa harus menunggu di tengah laut dan terombang-ambing saat cuaca buruk atau badai. Hal ini disebabkan karena jika memaksa untuk menepi, risiko terjadinya kecelakaan lebih besar. Padahal, keamanan dalam bekerja merupakan fitur penting lainnya dalam konstruksi hak atas pekerjaan. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan terhadap keselamatan para nelayan tradisional.

Pada dasarnya, setiap nelayan yang melaut dihadapkan pada risiko tersebut, baik sebelum

maupun sesudah adanya aktivitas kapal-kapal isap produksi timah di laut. Namun, poin pentingnya adalah setelah adanya kapal-kapal isap produksi yang beraktivitas di Laut Matras, nelayan-nelayan harus memutar rutennya sebelum kembali ke pesisir. Akibatnya, ketika badai atau cuaca buruk terjadi di tengah laut, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali. Bahkan, terkadang tidak cukup waktu untuk segera kembali ke pesisir dan terpaksa menghadapi cuaca buruk tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan bagi nelayan tradisional di Laut Matras antara sebelum dan sesudah adanya aktivitas kapal-kapal isap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari aktivitas kapal-kapal isap produksi terhadap hak atas pekerjaan nelayan tradisional di Laut Matras terasa khususnya pada unsur akses terhadap pekerjaan dan keamanan dalam bekerja. Keberadaan kapal-kapal isap produksi di Laut Matras hanya tidak secara langsung berdampak pada kebebasan nelayan tradisional dari kerja paksa yang juga merupakan fitur utama hak atas pekerjaan. Hal ini disebabkan karena praktik tersebut tidak terjadi di lingkungan nelayan tradisional Matras, walaupun mereka terpaksa untuk berhutang pada tengkulak sehingga secara substansial terjebak dalam situasi terikat.

Temuan penting dalam penelitian ini terkait persoalan yang dihadapi nelayan tradisional di Kawasan Matras sebagai residu dari aktivitas proyek tambang timah di laut adalah terpolarisasinya masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat aktivitas tambang timah di laut menyebabkan masyarakat di sekitar Kawasan Matras menjadi terbelah antara pro dan kontra. Konflik horizontal yang menyebabkan masyarakat nelayan tradisional di Kawasan Matras terpolarisasi ini tentunya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Konflik horizontal seperti yang terjadi di Kawasan Matras bukanlah kasus baru. Maliki (2004: 204) menyatakan bahwa selama ini, konflik yang terjadi di tengah masyarakat didominasi oleh pertarungan kepentingan pada sektor-sektor strategis yang menyangkut sumber daya. Sebagaimana yang dikemukakan Safa'at dan Qurbani (2017: 156) bahwa konflik atau sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini tidak lagi bersifat ideologis, akan tetapi telah bergeser ke arah konflik multikultural yang berbasis pada perbedaan pemahaman berbudaya masyarakat. Keadaan inilah yang juga terjadi pada masyarakat nelayan di Kawasan Matras. Pembelahan masyarakat ke

dalam kelompok pro dan kontra disebabkan karena perbedaan pemahaman mengenai persoalan tambang timah di laut dan adanya kepentingan tertentu terhadap hal tersebut. Kelompok yang pro beranggapan bahwa tambang timah di laut dapat dilakukan karena adanya legalitas hukum dan mereka menuntut untuk mendapatkan hak kompensasi atas itu. Sedangkan kelompok kontra menolak segala kegiatan penambangan timah di laut beserta kewajiban kompensasi karena lebih mementingkan kondisi laut kedepannya pasca aktivitas tersebut. Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antarmasyarakat nelayan di Kawasan Matras.

Selain itu, akar polarisasi masyarakat di Kawasan Matras juga bermula sebelum masuknya kapal-kapal isap produksi di Laut Matras. Para nelayan tradisional yang secara *de facto* beraktivitas di Laut Matras tidak dilibatkan oleh pihak penambang dalam baik dalam bentuk sosialisasi atau pembicaraan soal masuknya kapal-kapal isap. Namun, ketika kapal-kapal isap produksi tersebut telah masuk dan mulai beraktivitas, para pemilik kepentingan tambang timah mengaku telah melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan. Hal inilah yang kemudian menjadi akar persoalan polarisasi ini. Nelayan-nelayan tradisional di Laut Matras menduga bahwa yang dilibatkan adalah nelayan fiktif dan oknum-oknum yang tidak merepresentasikan nelayan tradisional di Laut Matras. Hal tersebut dapat dilihat dari penolakan berupa demonstrasi oleh nelayan-nelayan tradisional di Laut Matras yang satu suara menolak aktivitas kapal-kapal isap produksi. Namun, sebagaimana yang dikemukakan Wijaya dan Fauzie (2020: 97) bahwa nelayan kecil (tradisional dan buruh) tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik karena dalam posisi dependen marjinal. Akibatnya, penolakan dalam bentuk demonstrasi oleh nelayan tradisional di Laut Matras tidak berhasil.

Pandangan Konsep *Inclusive Citizenship* Terhadap Persoalan Dampak Tambang Timah di Laut Bagi Hak Atas Pekerjaan Nelayan Tradisional

Persoalan yang dihadapi nelayan tradisional di Kawasan Matras, apabila ditarik dalam penjabaran Heater (1999) mengenai problematika hak warga negara, tergolong dalam *rights defined in distorted form*. Hal ini disebabkan karena hak atas pekerjaan telah diatur secara tegas di dalam konstitusi, akan tetapi dalam praktiknya justru terdistorsi. Oleh karena itu,

persoalan ini sangat tepat untuk ditinjau dari perspektif konsep *inclusive citizenship*. Konsep *inclusive citizenship* didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh anggota kelompok masyarakat tanpa memandang identitas (Theophilus dalam Syaiful, 2013: 7). Artinya, konsep ini dibangun dengan pandangan bahwa tidak boleh ada satu kelompokpun yang tereksklusifkan. Maka, dalam kehidupan bernegara, konstruksi konsep *inclusive citizenship* menghendaki seluruh kelompok masyarakat yang terikat pada organisasi negara memiliki kedudukan setara. Kelompok yang rentan secara sosial, ekonomi, maupun politik juga memiliki kedudukan yang sama dan tidak diperkenankan tereksklusifkan hak-haknya. Oleh karena itu, Lister (2007, 50-51) menyatakan bahwa konstruksi konsep *inclusive citizenship* mengandung nilai-nilai yaitu *justice, recognition, self-determination*, dan *solidarity*.

Apabila dikaitkan pada hasil penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan nilai yang telah terkonsepkan. Persoalan tidak adanya pelibatan nelayan tradisional dalam proses sebelum masuknya kapal-kapal isap produksi di Laut Matras menunjukkan bahwa adanya nilai keadilan yang dikesampingkan. Terlebih, menurut pengakuan nelayan tradisional di Kawasan Matras dalam penelitian ini bahwa yang dilibatkan adalah oknum-oknum tertentu dan nelayan fiktif. Padahal, yang bersinggungan langsung dengan aktivitas kapal-kapal isap di Laut Matras adalah nelayan tradisional di sana. Kabeer (2005: 3) menyatakan bahwa batas keadilan adalah ketika adil untuk diperlakukan sama dan adil ketika diperlakukan berbeda. Berdasarkan pernyataan tersebut, kondisi ini akan adil ketika para nelayan tradisional yang sehari-hari beraktivitas di Laut Matras dilibatkan dalam pembicaraan soal rencana operasional kapal-kapal isap tersebut. Ketidakadanya nilai keadilan ini kemudian membuat persoalan tambang timah di Laut Matras terus bergulir dan membelah masyarakat sekitar Kawasan Matras.

Tidak adanya pelibatan nelayan tradisional tersebut kemudian berimbas pada nihilnya nilai pengakuan (*recognition*) terhadap mereka. Perasaan nelayan tradisional yang diperlakukan tidak adil membuat mereka menempatkan diri pada posisi tidak diakui haknya di laut tersebut. Meskipun pemerintah menyatakan fakta sebenarnya tidak seperti itu. Namun, proses yang tidak transparan sebagaimana dikeluhkan nelayan tradisional membuat kenyataan sebagaimana yang diakui pemerintah menjadi samar.

Penelitian ini menemukan bahwa nelayan tradisional menyatakan bahwa negara yang diwakili pemerintah tidak peduli akan hak-hak mereka. Tidak adanya sosialisasi atau pelibatan kepada nelayan-nelayan tradisional tentang aktivitas kapal-kapal isap produksi di Laut Matras, membawa mereka merasa tidak dihargai. Kabeer (2005: 4) menyatakan bahwa pengakuan merupakan nilai intrinsik bagi semua manusia di mana batasnya adalah menghargai perbedaan dan antarsesama. Selain itu, belum adanya solusi konkret bagi para nelayan tradisional yang terdampak aktivitas kapal-kapal isap produksi menguatkan argumentasi mereka bahwa eksistensinya tidak diakui. Keadaan ini semakin diperparah ketika suara para nelayan tradisional di Laut Matras yang diperjuangkan melalui demonstrasi tidak mengubah kebijakan apapun.

Meskipun persoalan yang dihadapi para nelayan tradisional di Laut Matras mengurangi beberapa nilai-nilai inti dari konsep *inclusive citizenship*, mereka tetap dapat menentukan nasibnya sendiri. Nelayan-nelayan tradisional tetap dapat melakukan aktivitasnya tanpa ada intervensi dan ancaman dari pihak manapun. Sebagaimana yang dikemukakan Kabeer (2005: 5) bahwa penentuan nasib sendiri (*self-determination*) sebagai nilai dalam konsep *inclusive citizenship* menitikberatkan pada kemampuan orang untuk menjalankan beberapa tingkat kontrol atas hidupnya. Selain itu, dampak dari aktivitas penambangan timah di Laut Matras tidak mengurangi independensi para nelayan tradisional dalam menentukan nasib hidupnya. Bahkan, pemerintah juga berupaya melakukan pemberdayaan bagi nelayan kecil melalui program-program kerja yang direncanakan walaupun terbatas. Artinya, dampak dari proyek penambangan timah di Laut Matras tidak mengurangi nilai *self-determination* nelayan tradisional. Namun, walaupun nilai *self-determination* para nelayan tradisional tetap terjaga, aktivitas tambang timah di laut telah membawa mereka pada situasi pelik untuk melanjutkan pekerjaan yang merupakan sandaran hidup mereka.

Aktivitas tambang timah di laut juga telah membawa solidaritas yang merupakan salah satu nilai penting dalam konsep *inclusive citizenship* menjadi terancam. Polarisasi masyarakat dan berkurangnya kepercayaan nelayan-nelayan tradisional pada negara yang direpresentasikan pemerintah sebagai residu dari persoalan ini menjadi faktor utama untuk melihat terancamnya nilai ini. Lister (2007: 51) menyatakan bahwa *solidarity* adalah nilai yang

menjadi cerminan penting hubungan horizontal kewarganegaraan yaitu antarwarga negara dan vertikal antara negara dengan individu. Polarisasi antara kelompok pro dan kontra terhadap aktivitas penambangan timah di laut memperlihatkan rusaknya solidaritas horizontal hubungan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, *distrust* yang muncul terhadap negara dari para nelayan tradisional juga merusak solidaritas secara vertikal dalam hubungan antarkeduanya. Artinya, selain berdampak pada hak atas pekerjaan kelompok masyarakat nelayan tradisional, persoalan ini juga mengganggu nilai *solidarity* dalam bingkai konsep kewarganegaraan yang inklusif.

Simpulan

Aktivitas proyek tambang timah di Laut Pulau Bangka telah berdampak pada hak atas pekerjaan nelayan tradisional di Kawasan Matras. Hal tersebut terlihat dari dampak pada akses terhadap pekerjaan dan keamanan dalam bekerja nelayan tradisional. Dampak pada akses terhadap pekerjaan di antaranya yaitu: 1) terhalangnya jalur mobilitas nelayan tradisional akibat keberadaan kapal-kapal isap produksi dan sisa limbah yang menyebabkan pendangkalan laut, 2) kerusakan ekosistem laut di sekitar kawasan aktivitas kapal-kapal isap produksi timah, 3) peningkatan kebutuhan modal bahan bakar dan ransum untuk melaut, 4) kapasitas kapal-kapal nelayan tradisional yang terbatas menjadi kurang kompetibel untuk menempuh jarak lebih jauh. Sedangkan dampak terhadap keamanan dalam bekerja bagi nelayan tradisional adalah risiko keselamatan yang semakin tinggi karena harus menempuh jarak lebih jauh dengan kapasitas kapal terbatas. Selain itu, dampak lain yang dirasakan para nelayan tradisional adalah terbelahnya masyarakat di lingkungan mereka kedalam kelompok pro dan kontra. Akibatnya, proyek tambang timah di Laut Pulau Bangka menyebabkan polarisasi antara kelompok masyarakat tersebut.

Berbagai dampak dari aktivitas proyek tambang timah di laut terhadap hak atas pekerjaan nelayan tradisional sebagaimana yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia belum sepenuhnya inklusif. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya ancaman terhadap hak konstitusional warga negara. Padahal, dalam bingkai konsep *inclusive citizenship* pemikmatan terhadap hak warga negara harus adil tanpa ada kelompok yang terdiskriminasi.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini, peneliti memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk mengkaji kembali izin usaha penambangan (IUP) di Laut Pulau Bangka dan Perda Nomor 3 Tahun 2020 atau RZWP3K yang menjadi dasar hukumnya dengan melibatkan masyarakat terdampak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak nelayan tradisional di Kawasan Matras yang terdampak aktivitas proyek tambang timah di Laut Pulau Bangka.

Daftar Pustaka

- Adi, W. (2012). Kondisi Sosial Nelayan Pasca Timbulnya Tambang Inkonvensional (TI) Apung di Bangka Belitung. *AKUATIK-Jurnal Sumber Daya Perairan*, 6 (2), 11-18.
- Bidayani, E & Kurniawan. (2020). Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional. *Society*, 8 (1), 14-24.
- Craven, M. (1995). *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-A Perspective on its Development*. Clarendon: Oxford.
- El Muhtaj, M. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Fukuda-Parr, S., Lawson-Remer, T., & Randolph, S. (2009). An Index of Economic and Social Rights Fulfillment: Concept and Methodology. *Journal of Human Right*, 8 (3), 195-221.
- Erman, E. (2010). Aktor, Akses, dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 36 (2), 71-101.
- Hartanto, R.V.P, Sulistiyono, A, & Isharyanto. (2019). Feminist Perspective towards the Legal Theory on Fisher-Women's Legal Entity. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (4), 345-360.
- Ibrahim, I. (2015). Dampak Penambangan Timah Illegal yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung. *SELISIK*, 1 (1), 77-90.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5 (1), 63-82.
- Kabeer, N. (2005). *Introduction: The Search for Inclusive Citizenship*. London & New York: Sage.
- Kusnadi (Ed.). (2004). *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Bantul: Pondok Edukasi Pokja Pembaruan.

- _____. (2008). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LkiS.
- Levin, L. (1998). *Human Rights Question and Answer*. India: National Book Trust.
- Lister, R. (2007). Inclusive Citizenship: Realizing the Potential. *Citizenship Studies*, 11 (1), 49-61.
- Listyawati, A. (2016). Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40 (1), 61-70.
- Maliki, Z. (2004). *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM).
- McGoodwin, J. R. (1990). *"The Tragicomedy of the Commons", Crisis in the World Fisheries: People, Problems, and Policies*. California: Stanford University Press.
- Prianto, E. & Husnah. (2009). Penambangan Timah Inkonvensional: Dampaknya Terhadap Kerusakan Biodiversitas Perairan Umum di Pulau Bangka. *BAWAL*, 2 (5), 193-198.
- Safa'at, R & Qurbani, I, D. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Konstitusi*, 14 (1), 150-167.
- Syaiful, N. H. (2013). *Merebut Kewarganegaraan Inklusif*. Yogyakarta: POLGOV UGM.
- Wijaya, A. B. & Fauzie, A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*, 2 (2), 96-108.
- Yunianto, B. (2009). Kajian Problema Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 5 (3), 97-113.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2045.
- <https://sumsel.suara.com/read/2021/07/14/115809/gubernur-bangka-belitung-tak-hadir-nelayan-tinggalkan-kapal-isap-timah?page=all>, diakses pada 17 Juli 2021 pukul 22.42 WIB.
- <https://bangka.tribunnews.com/2021/04/05/nelayan-ini-ungkap-terpaksa-melaut-sejauh-21-mil-setelah-aktivitas-tambang-ganggu-area-tangkapan>, diakses pada 18 Juli 2021, pukul 09.33 WIB.
- https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_124556.pdf, diakses pada 29 Juni 2021, pukul 21.46 WIB.